

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *Good corporate governance*, *Corporate social responsibility* dan nilai perusahaan diambil dari beberapa sumber :

Penelitian Amoateng *et, al* (2016) bertujuan untuk mengetahui dampak praktik tata kelola perusahaan pada kinerja UKM di Ghana dan peran perusahaan dalam kemajuan ekonomi di Ghana dengan memastikan tata kelola yang baik dari perusahaan. Metode yang digunakan *convenience sampling* dengan memilih seratus (100) UKM dari dua wilayah di Ghana. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan UKM dari tahun keuangan 2012 hingga 2016. Margin laba bersih (NPM) dan laba atas aset (ROA) digunakan sebagai proksi untuk kinerja dan model regresi *Ordinary Least Square* (OLS) digunakan untuk memperkirakan tingkat dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja UKM di Ghana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh pada kinerja UKM. Penelitian ini mengevaluasi dampak praktik *good corporate governance* terhadap kinerja UKM di Ghana. Peneliti menemukan bukti empiris untuk mendukung pandangan bahwa ukuran dewan (BS) memiliki dampak negatif pada NPM, meskipun tidak signifikan. Di samping itu, perbedaan peran untuk CEO dan ketua dewan (DR) memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Selain itu, sudah dipastikan bahwa risikonya atau tingkat *leverage* perusahaan memiliki dampak negatif yang signifikan pada NPM dan ROA.

Penelitian Khafid (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dewan direksi, komite audit, dan *governance committee* terhadap publikasi *sustainability report*. Metode analisis data penelitian ini yaitu regresi logistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Sampel yang masuk kriteria sebanyak 17 perusahaan. Unit analisis sampel untuk tahun 2011-2013 sebanyak 51 *annual report*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *governance committee*, berperan positif terhadap publikasi *sustainability report*. *Leverage*, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*.

Penelitian Makhdalena (2013) bertujuan untuk mendapatkan kejelasan secara empiris pengaruh *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) terhadap akrual diskresioner. Metode yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 31 perusahaan dan semuanya diteliti. Data variabel penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi (laporan tahunan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) baik secara simultan maupun parsial terhadap akrual diskresioner pada perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini berarti bahwa *corporate governance* (dewan direksi dan komite audit) yang ada di perusahaan pada sektor perbankan tercatat di Bursa Efek Indonesia telah bekerja secara efektif.

Penelitian Mai (2012) bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap nilai perusahaan melalui pertumbuhan, profitabilitas dan kebijakan dividen. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa perusahaan tersebut membagikan dividen tunai dan memiliki anggota komisaris independen. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode tahun 2000-2012. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, walaupun pada saat itu perusahaan mengurangi pembayarannya. Hasil *Sobel test* menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan terhadap nilai perusahaan secara signifikan dimediasi profitabilitas yang diproksi *return on equity*. Mekanisme *corporate governance* berperan dalam mencegah pertumbuhan yang tidak produktif dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai tahap *maturity*. Peningkatan nilai perusahaan selain dipengaruhi pertumbuhan, juga dipengaruhi oleh kemampuannya dalam meningkatkan profitabilitas dan pembayaran dividen.

Penelitian Luthan (2012) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pengaruh karakteristik perusahaan sebagai variabel moderating dalam hubungan antarapengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sampel penelitian adalah 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014. Sampel penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan. Umur perusahaan, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan digunakan sebagai proksi dari karakteristik perusahaan, sedangkan *return on asset (ROA)* dan *tobin's Q* sebagai proksi dari kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Hasil uji hipotesis menunjukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, sedangkan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *tobin's Q* tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Putri (2015) bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan menguji ukuran perusahaan dan jumlah dewan komisaris sebagai variabel moderating. Penentuan sampel digunakan dengan metode *purposive sampling* dengan pendekatan *Judgment Sampling* dengan jumlah sampel yang diamati sebanyak 79 perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2012 yang berjumlah 131 perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *MRA (moderated regression analysis)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh *Corporate social responsibility*.

Penelitian Lin *et al* (2017) bertujuan untuk mengetahui hubungan CSR dan kinerja keuangan di Perusahaan Taiwan dan Perusahaan Indonesia. Data dan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan Indonesia dan perusahaan Taiwan. Di Indonesia, perusahaan CSR dikumpulkan dari SRI Kehati Index, yang mewakili perusahaan memiliki kinerja luar biasa dalam mempromosikan bisnis yang berkelanjutan, tata kelola perusahaan yang baik, dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Indeks ini telah menerbitkan 25 perusahaan setiap enam bulan sejak 2008 dan data sekunder diambil dari laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel dari perusahaan Taiwan dipilih dari *Common Wealth* Majalah yang telah terpilih sebagai perusahaan terbaik yang memiliki komitmen terhadap lingkungan hijau. Kemudian, data kinerja keuangan adalah data keuangan diambil dari Taiwan *Economic Journal Databank*. Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara CSR dan kinerja keuangan. Hal ini didukung oleh bukti bahwa mereka sudah mulai sama melakukan CSR dan hampir 8 tahun. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa perusahaan yang menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka mendapatkan efek positif pada kinerja mereka karena biaya sosial yang dihabiskan dalam kegiatan ini akan membuat bisnis lebih efisien dan menciptakan nilai yang lebih baik.

Penelitian Majeed *et.al* (2015) tujuannya untuk mengetahui efek potensial dari perusahaan elemen tata kelola (CG) pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Metode yang digunakan teknik regresi untuk mengukur dampak elemen CG terhadap CSR dengan laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2007–2011 diperiksa untuk menganalisis hubungan tersebut antara CG dan pelaporan CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan dengan persentase yang lebih tinggi dari direktur independen cenderung memiliki tingkat pelaporan CSR yang tinggi, ditolak dalam semua pengungkapan lima tahun yang menunjukkan, bahwa di Pakistan, para direktur independen tidak tertarik dalam pelaporan CSR. Oleh karena itu, dalam kasus Pakistan, para direktur independen lebih memilih untuk lebih fokus keuangan perusahaan daripada kinerja sosial.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) *good corporate governance* adalah Struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan yang berlaku.

Definisi corporate governance menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut :

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting dan *relevan* secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders* karena keyakinan dan kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu stakeholder dalam

menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari *agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan. Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4. *Independency* (Kemandirian)

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara *independent*, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak

dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Dalam hal ini pula, setiap organ perusahaan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang telah ditentukan, tidak mendominasi atau melempar tanggung jawab satu sama lain sehingga kejelasan tugas dan tanggung jawab dapat terlihat.

5. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Dapat dipastikan semua *investor* pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap *asset* atau *capital* yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Untuk itu perusahaan dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara *fair*, termasuk kepada pemegang saham minoritas. Dengan adanya prinsip *fairness* diharapkan seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Penegakan prinsip *fairness* menyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

3. Unsur-unsur Good Corporate Governance

Menurut Tunggal (2013) unsur-unsur *Good Corporate Governance* terdiri dari:

1. Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat atau rekomendasi profesional terhadap dewan komisaris mengenai kondisi tata kelola perusahaan yang dijalankan manajemen perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan

manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham.

3. Kepemilikan Insitutional

Kepemilikan Insitutional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.

4. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidakterafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan

4. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *Good Corporate Governance* pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4, antara lain :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip GCG.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, terbuka, dan efisien.
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan sesuai dengan peraturan.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi BUMN.

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Serta tujuan *good corporate governance* adalah penerapan sistem GCG yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang dan melindungi para pemegang saham serta pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan.

6. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki peran yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Meminimalkan *Agency Cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *Cost of Capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya

2.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut WBCSD (*The World Business Council for Sustainable Development*) CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berperilaku etis dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dan masyarakat yang luas. Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial, kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Landasan Hukum Corporate Social Responsibility

a. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta program pemberdayaan (disebut Program Bina Lingkungan).

b. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 yang berisi peraturan mengenai diwajibkannya melakukan CSR. Direksi yang bertanggung jawab bila ada permasalahan hukum yang menyangkut perusahaan dan CSR.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam penjelasan pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.

3.Prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility*

Mardikanto (2014) mengatakan implementasi *Corporate Social Responsibility* didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kepatuhan hukum, dalam arti perusahaan harus memahami dan mematuhi semua peraturan, lokal, internasional yang dinyatakan secara tertulis dan tidak tertulis, sesuai dengan prosedur tertentu.
- b. Kepatuhan terhadap hukum adat internasional, artinya ketika menetapkan kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, perusahaan harus mematuhi, keputusan, pedoman, peraturan pemerintah, deklarasi dan atau perjanjian internasional.
- c. Menghormati stakeholder terkait, dalam arti perusahaan harus mengakui dan menerima keberagaman stakeholder terkait dan keragaman perusahaan-mitra (besar dan kecil) dan unsur-unsur lain, yang dapat mempengaruhi stakeholder terkait.
- d. Prinsip transparansi, artinya perusahaan harus jelas, akurat, dan komprehensif dalam menyatakan kebijakan, keputusan dan kegiatan termasuk pengenalan terhadap potensi lingkungan dan masyarakat. Selain itu informasi tersebut harus tersedia bagi orang yang terkena dampak, atau mereka yang mungkin akan terpengaruh secara material oleh perusahaan
- e. Menghormati hak azasi manusia, dalam arti, perusahaan harus melaksanakan kebijakan dan praktik yang akan menghormati hak azasi manusia yang ada dalam deklarasi *universal rights* manusia.

4. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Menurut Rusdianto (2013:13) dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan fokus kepada tiga hal, yaitu :

a. Profit

Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.

b. Lingkungan

Dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana disini bukan hanya sekedar memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana.

c. Sosial atau masyarakat.

Perhatian terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

5. Pengungkapan dalam *Corporate Social Responsibility*

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia adalah merujuk standar yang dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability reporting*. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI menggunakan 6 indikator pengungkapan yaitu : ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Indikator indikator yang terdapat didalam GRI yang digunakan yaitu :

- a. Indikator Kinerja Ekonomi (*economic performance indicator*).
- b. Indikator Kinerja Lingkungan (*environment performance indicator*).
- c. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (*labor practices performance indicator*).
- d. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (*human rights performance indicator*).
- e. Indikator Kinerja Sosial (*social performance indicator*).
- f. Indikator Kinerja Produk (*product responsibility performance indicator*).

2.2.3 Nilai Perusahaan

1. Pengertian Nilai Perusahaan

Enggar (2013) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai nilai pasar. Apabila harga saham perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan akan meningkat dan diharapkan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham secara maksimal. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para investor menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional tersebut diposisikan sebagai manajer ataupun dewan komisaris

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Rusdianto (2013) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, diantaranya:

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan. Dalam hal besarnya perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran para pemilik atas aset tersebut. Dari sisi pemilik perusahaan, jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi manajemen kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

b. *Leverage*

Leverage akan menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. *Leverage* juga merupakan penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Artinya, *leverage* yang besar menunjukkan risiko investasi yang besar pula, begitupun sebaliknya. Akan lebih baik apabila perusahaan mengusahakan sumber pendanaan internal terlebih

dahulu daripada menggunakan sumber pendanaan eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan rasio *leverage* yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat berbagai macam seperti: laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Rasio ini menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan. Naiknya laba bersih dapat mengindikasikan bahwa nilai perusahaan juga naik karena dengan naiknya laba bersih akan menyebabkan harga saham yang berarti juga kenaikan dalam nilai perusahaan.

d. Kebijakan Dividen

Kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham merupakan suatu kebijakan penting. Kebijakan dalam pembagian dividen (*dividend policy*) tidak hanya sekedar membagikan keuntungan yang telah diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, namun juga merupakan suatu kebijakan yang harus diikuti dengan pertimbangan adanya kesempatan.

e. *Corporate Social Responsibility*

Suatu mekanisme bagi perusahaan atau organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan para *stakeholders*. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Kebanyakan konsumen akan meninggalkan produk yang memiliki citra buruk atau diberitakan negatif. Pelaksanaan CSR akan memberikan citra baik atau positif bagi perusahaan sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan sehingga akan meningkatkan harga saham dan berdampak baik bagi nilai perusahaan.

f. *Good Corporate Governance*

Dengan adanya GCG diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan atas aset ataupun dana yang dimiliki perusahaan serta efisiensi penggunaannya. GCG memiliki mekanisme yang akan dibentuk oleh suatu perusahaan yang akan menerapkannya berupa komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit yang akan mengawasi dan mengontrol manajemen sehingga dapat meningkatkan kinerja serta mengurangi konflik keagenan tersebut.

3. Indikator - indikator untuk mengukur Nilai perusahaan

Menurut Stiyarini (2016) mengatakan ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan :

- a. Price Earning Ratio (PER) yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para pemegang saham.
- b. Price Book Value (PBV) yaitu rasio untuk mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh. Semakin tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai rasio PBV semakin tinggi penilaian investor dibandingkan dengan dana yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut, sehingga semakin besar pula peluang para investor untuk membelisaham perusahaan.
- c. Rasio Tobin's Q digunakan sebagai indikator penilaian nilai perusahaan. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin's (1967). Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dollar investasi inkremental.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Sesuai dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa secara teoritis *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik mampu meyakinkan investor bahwa perusahaan telah berusaha untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para investor. *Good Corporate Governance* (GCG) yang mempunyai pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan professional memiliki efektifitas manajemen yang tinggi dalam mengelola perusahaan. Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap asset yang diinvestasikan oleh investor yang menimbulkan penilaian yang baik terhadap perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham, sehingga pemegang saham dapat menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut. Dengan adanya persaingan antar perusahaan yang kompetitif, maka harus didukung dengan penyajian laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dapat memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan yang dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.

2.3.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial) saat ini tidak hanya memiliki sifat yang sukarela atau komitmen yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kegiatan pada perusahaan tersebut, namun saat ini CSR juga menjadi suatu hal yang wajib diterapkan pada beberapa perusahaan. Berdasarkan pada UU No.44 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas maka suatu perusahaan khususnya perseroan terbatas diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan

kemakmuran pemilik atau pemegang saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya yaitu memperbaiki lingkungan serta kesenjangan sosial di lingkungan sekitarnya. Semakin tingginya bentuk pertanggungjawaban tersebut maka semakin meningkatnya *image* perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik sehingga lebih mudah menarik minat para investor untuk menanam saham pada perusahaan. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga saham perusahaannya, jika harga saham tinggi maka dapat dikatakan nilai perusahaan juga baik. Loyalitas pelanggan pun juga akan meningkat, dimana pelanggan yang loyal biasanya menghasilkan laba sepanjang perjalanan bisnis perusahaan tersebut. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang semakin meningkat.

2.3.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan

Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* akan berdampak meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. GCG dan CSR dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena semakin baik tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efisien sehingga akan meningkatkan profit.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian hubungan antara variabel diatas, maka dirumuskan hipotesis – hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H₂ : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.
- H₃ : *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

2.5 Kerangka Konseptual

